



Cegah TPPO, Butuh Sinergi Lintas Sektoral

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Upaya preventif tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan seiring dengan banyaknya pekerja migran di DIY. Isu TPPO menjadi perhatian khusus karena pada 2023 lalu, Pemkot Yogyakarta mencatat lima orang menjadi korban perdagangan orang.

"Pemkot Yogyakarta siap bekerja sama dengan instansi terkait, baik di level nasional maupun internasional, untuk memperkuat kebijakan dan langkah konkret dalam pencegahan TPPO," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Yogyakarta Yunianto Dwisutono, Rabu (11/9).

Selain banyak warga yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, Yunianto berharap memperkuat koordinasi dan peran lintas sektor di Kota Yogyakarta untuk menutup celah ruang gerak para pelaku TPPO. Selain itu, lanjut dia, pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran perlu ditingkatkan disertai penindakan hukum yang tegas.

"Koordinasi lintas sektor ini menjadi langkah konkret yang sangat penting dalam upaya kita bersama dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi pekerja migran Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Retnaningtyas menyebutkan hak asasi manusia dan merusak citra bangsa.

Menurutnya, munculnya kasus TPPO bisa karena faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya peluang kerja, konflik sosial, serta lemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat. "Kebanyakan pelaku TPPO ini sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga atau teman terdekat korban," katanya.

DP3AP2KB Kota Yogyakarta mengajak lintas sektor di lingkup Pemkot Yogyakarta memperkuat pencegahan dan penanganan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO serta PMI non-prosedural. Upaya pencegahan itu, kata dia, diperkuat antara lain melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GTTP TPPO) di Kota Yogyakarta.

"GTTP TPPO terdiri atas berbagai lintas sektor, di antaranya OPD di lingkup Pemkot Yogyakarta, LSM, serta lembaga layanan yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan TPPO," jelasnya. (ara/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005